

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah kemajuan yang diharapkan secara sosial dan ekonomi, dan manusia senantiasa mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang dinamakan dengan diharapkan. Pembangunan menyangkut perubahan mendasar dari semua struktur ekonomi dan sosial. Ini menyangkut perubahan-perubahan dalam distribusi pendapatan dan pekerjaan (Prayitno, 1986). Proses pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada keterkaitan antar sektor perekonomian yang ada karena masing-masing sektor tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling menunjang antara sektor yang satu dengan sektor yang lain. (Arsyad 1999).

Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi (Sukirno, Sadono; 2004). Namun, pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dalam UUD 1945 (Ramelan, 1997). Peran pemerintah sebagai pengendali pembangunan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara Indonesia sangat diperlukan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Dalam tiga dekade terakhir, pembangunan nasional menitikberatkan pada sektor manufaktur, sementara sektor bangunan yang sampai saat ini masih merupakan tumpuan hidup masyarakat pada umumnya hanya diposisikan sebagai sektor pendukung.

Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya merupakan bentuk realisasi pembangunan nasional di suatu daerah yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sosial, tingkat ekonomi dan peraturan-peraturan yang berlaku (Purnomo dan Istiqomah, 2008: 137). Menurut Radianto dalam Nugraha (2007: 4) pembangunan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan perekonomian, perubahan dalam unit-unit produktif, serta perubahan status kerja buruh. Pembangunan ekonomi sendiri pada dasarnya merupakan suatu perubahan dalam struktur

produksi dan alokasi sumber daya. Proses pembangunan tidak terlepas dari strategi pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi arah pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah mengoptimalkan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah, menyesuaikan laju pertumbuhan antar daerah, juga mengacu pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arsyad 1999).

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah sektor untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Arsyad 1999).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001).

Aktifitas suatu sektor perekonomian tidak terlepas dengan sektor-sektor perekonomian yang lain, sehingga suatu kebijakan yang berkaitan langsung dengan sektor tersebut akan berimbas pada perekonomian secara makro. Peranan sektor-sektor perekonomian pada hakekatnya merupakan penggambaran dari

adanya saling keterkaitan diantara sektor-sektor perekonomian tersebut yang keterkaitannya perlu dianalisis lebih lanjut terhadap sektor-sektor lainnya. Keseimbangan (atau ketidakseimbangan) di satu sektor berpengaruh akan dapat berpengaruh terhadap sektor yang lainnya.

Sektor-sektor ekonomi apakah yang paling strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. (Suyatno 2000:146).

Di negara yang sedang berkembang, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan wilayah. Campur tangan tersebut adalah pemerintah sebagai bentuk institusi merupakan sistem pengambil keputusan dan melahirkan aturan-aturan yang menyangkut alokasi sumber daya serta pemanfaatannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

untuk merencanakan dan mengelola pembangunan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mudrajad Kuncoro, 2004).

keterkaitan antar sektor antar daerah, menentukan pola ketergantungan ekonomi antar daerah. Ketergantungan ekonomi antar daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola. Pertama, pola “dominan-tergantung” (*dependence*). Pola ini mempunyai ciri interaksi antara wilayah dominan dan wilayah yang tergantung, di mana wilayah dominan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam interaksi ekonomi, bahkan cenderung mengeksploitasi wilayah yang tergantung untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Dengan demikian, pola ini akan menimbulkan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang semakin besar. Kedua, pola “*centre-periphery*” (konsep *interdependence*) dengan sektor industri (moderen) umumnya berada di wilayah perkotaan sebagai wilayah center dan sektor primer (tradisional) yang umumnya berada di wilayah pedesaan atau pinggiran kota sebagai wilayah *periphery*. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah *periphery* menghasilkan dan memasok bahan baku (input) ke wilayah center, sehingga kemajuan ekonomi wilayah center akan menarik kemajuan ekonomi wilayah *periphery* ke tingkat yang lebih maju. Hal yang serupa juga terjadi apabila ekonomi wilayah *periphery* mengalami pertumbuhan maka permintaan akan hasil produksi wilayah center

akan meningkatkan, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah center.

Kondisi daerah di Indonesia yang secara geografis dan sumberdaya alam yang berbeda, menimbulkan daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah yang lainnya. Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dan berbeda-beda bagi masing-masing daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Pembangunan ekonomi Kota Cirebon terus menggeliat hampir separuh dari seluruh luas Kota Cirebon dijadikan pusat pembangunan. Tahun 2014 tercatat sebanyak 1.600 hektar lahan sudah berubah menjadi pusat pembangunan yang komersial dari total 3.800 luas Kota Cirebon. Proses pembangunan gedung-gedung besar, dan perbaikan pelebaran ruas jalan, terlihat di beberapa titik tengah kota. Sebagian diproyeksikan untuk bisnis perdagangan, bidang jasa, dan juga pelayanan publik. Dilihat dari sektor bangunan terdapat beberapa pusat perbelanjaan modern dan beberapa hotel yang cukup banyak sehingga membuat Kota Cirebon dari kota transit menjadi destinasi wisata turut mendorong tingkat pertumbuhan salah satunya sektor perhotelan hingga 22,2% dengan okupansi mencapai 65% kondisi tersebut dinilai sebagai peluang investasi yang menarik bagi jasa pengelola hotel.

Pada tahun ini setidaknya akan ada penambahan 15 hotel baru yang telah mengajukan izin pembangunan di Kota Cirebon tersebut. Kondisi ini juga didorong oleh berbagai infrastruktur yang mempermudah aksesibilitas menuju

Kota Cirebon. Antara lain dengan dibangunnya jalan tol Cikampek-Palimanan dan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, serta pembangunan Bandara Internasional Kertajati. Dengan dibangunnya berbagai infrastruktur akan semakin mempermudah masyarakat yang berkunjung atau berwisata ke Cirebon. Selain dibidang perhotelan, pertumbuhan di berbagai macam bidang pun bertumbuh pesat. Setidaknya hotel dan restoran berkontribusi 7,76% dari pertumbuhan Kota Cirebon.

Kota Cirebon yang terletak di jalur perlintasan Jawa Barat dan Jawa Tengah memberikan kelebihan tersendiri. Selain sebagai kota transit. Kota ini juga menjadi daerah tujuan baik wisata maupun bisnis. Berdagang merupakan hal yang biasa bagi warga Kota Cirebon. Kota ini memiliki 12 kompleks ruko, 12 bangunan plasa dan mall serta 12 pasar tradisional. Meskipun bukan yang utama, transaksi jual beli sangat berarti bagi denyut kota.

Penerimaan PAD Kota Cirebon perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang selama ini ada, selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan baru, baik dari penerimaan sektor pajak maupun perusahaan daerah. Dengan alokasi dana pembangunan yang cukup kecil dibandingkan dengan alokasi untuk belanja rutin, salah satu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan pengelolaan yaitu anggaran belanja yang kontribusi cukup signifikan membangun perekonomian Kota Cirebon.

Perkembangan kegiatan ekonomi dan sosial kota Cirebon ini dapat dilihat dari nilai PDRB yang meningkat setiap tahunnya. Pada tabel 1.1 dapat dilihat

bahwa tahun 2013, PDRB kota Cirebon sebesar Rp 5,246 trilyun lebih besar daripada tahun 2011, yaitu sebesar Rp 5,557 trilyun. Kenaikan nilai PDRB ini terus terjadi pada tahun 2013, yaitu menjadi sebesar Rp 6,148 trilyun.

**Tabel 1.1**

Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2013 (dalam Jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
1.Pertanian	300.433,51	300.765,00	399.783,06	300.008,26
2.Pertambangan dan penggalian	0	0	0	0
3.Industri pengolahan	160.440,80	168.910,21	161.729,07	179.282,61
4.Listrik, Gas, Air Bersih	128.488,03	131.907,85	140.065,82	146.657,71
5.Bangunan	276.193,80	309.565,84	324.889,58	347.337,44
6.Perdagangan, Hotel, dan Restoran	149.620,53	176.216,54	187.094,04	183.763,83
7.Pengangkutan dan komunikasi	132.041,10	122.635,32	163.737,85	197.996,35
8.Bank, Usaha Pesewaan dan Jasa Perusahaan	159.027,81	196.665,31	124.425,67	152.836,66
9.Jasa-jasa	464.617,43	491.279,65	515.988,50	538.442,26
<b>PDRB</b>	<b>5.246.863,01</b>	<b>5.557.945,72</b>	<b>5.867.349,59</b>	<b>6.148.325,13</b>

Sumber : BPS Kota Cirebon Tahun 2013

Pertumbuhan Kota Cirebon yang semakin pesat ini, tidak luput oleh berbagai masalah yang mengikutinya. Adapun permasalahan tersebut antara lain kegiatan yang cenderung berorientasi di pusat kota, sehingga pusat kota akan semakin padat (gedung dan kegiatan bisnis) dan semakin macet ( arus lalu lintas). Kepadatan dan kemacetan di sekitar pusat kota utama ini harus disebarakan ke beberapa pusat ekonomi yang berada di sekitar pusat kota utama. Daerah sekitar pusat kota utama ini harus direncanakan sebagai kota mandiri dan diharapkan



kehidupan ekonominya tidak bergantung pada kegiatan perekonomian pusat kota utama, adanya ketimpangan pembangunan atau pembangunan yang tidak merata antara kawasan Cirebon Utara dan kawasan Cirebon Selatan.

Dampak pembangunan suatu sektor ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari nilai PDRB saja. Namun, juga dilihat dari kemampuan suatu sektor dalam menggerakkan seluruh keterkaitan perekonomian satu sama lainnya. Sub sektor bangunan memiliki peranan penting bagi perekonomian Kota Cirebon karena merupakan sektor basis yang memiliki sumber daya yang dapat diperbarui. Besarnya potensi sektor bangunan yang dimiliki dapat memberikan peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian, selain itu adanya keterkaitan sektor-sektor lain yang mampu memberikan kontribusinya terhadap perekonomian

**Tabel 1.2**

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (dalam persen)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
1.Pertanian	35,64	35,59	35,26	35,96
2.Pertambangan dan penggalian	0	0	0	0
3.Industri pengolahan	28,16	29,23	28,86	29,55
4.Listrik, Gas, Air Bersih	6,17	5,06	7,79	7,99
5.Bangunan	17,52	17,23	17,85	17,75
6.Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16,53	10,07	10,31	10,82
7.Pengangkutan dan komunikasi	10,22	10,20	10,08	10,45
8.Bank, Usaha Pesewaan dan Jasa Perusahaan	12,87	12,92	12,93	12,64
9.Jasa-jasa	12,30	11,06	9,27	11,12
<b>PDRB</b>	<b>10,67</b>	<b>10,85</b>	<b>9,49</b>	<b>10,79</b>

Sumber : BPS Kota Cirebon

Selama tahun 2010-2013 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sampai tahun 2011. Pertumbuhan mengalami penurunan tahun 2012 akibat dampak krisis ekonomi global, namun mengalami kenaikan tahun 2013. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan pada tahun 2010 tingkat laju pertumbuhan terendah dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011. Sektor bangunan pada tahun 2011 tingkat laju pertumbuhan mengalami penurunan. Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2012 tingkat laju pertumbuhan terendah dan pertumbuhan meningkat pada tahun 2013. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih pada tahun 2012 tingkat laju pertumbuhan terendah dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran pada tahun 2010 tingkat laju pertumbuhan tertinggi dan pertumbuhan terendah pada tahun 2011 dan itu artinya mengalami penurunan hingga tahun 2013.

Daerah atau wilayah yang mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimiliki kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut, penting dalam pembangunan daerah tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduknya, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya.

Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan sektor-sektor perekonomian Kota Cirebon khususnya sektor bangunan diperlukan sebuah komponen pendukung. Sektor bangunan di Kota Cirebon memang masih perlu untuk membuka akses

berbagai kawasan strategis maupun kawasan ekonomis yang potensial. Adanya pembangunan, maka diharapkan akan dapat menunjang dan mendorong sektor-sektor ekonomi di Kota Cirebon terutama sektor bangunan dan sektor lainnya yang dapat mendorong pembangunan ekonomi

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keterkaitan ke depan dan ke belakang serta dampak penyebaran sektor bangunan terhadap pembangunan ekonomi Kota Cirebon.
2. Bagaimana efek multiplier output terhadap sektor bangunan dan sektor-sektor lain pada pembangunan ekonomi Kota Cirebon
3. Bagaimana efek multiplier pendapatan terhadap sektor bangunan pada pembangunan ekonomi Kota Cirebon.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis keterkaitan sektor bangunan dengan sektor lain pada pembangunan ekonomi Kota Cirebon.
2. Menganalisis multiplier output pada sektor pembangunan dan sektor-sektor lain pada pembangunan ekonomi Kota Cirebon.
3. Menganalisis multiplier pendapatan sektor pembangunan pada pembangunan ekonomi Kota Cirebon.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Mengetahui keterkaitan dan multiplier dari sektor pembangunan dalam perekonomian Kota Cirebon.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan strategi yang tepat dalam rangka pembangunan sektor bangunan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Untuk dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan pengalaman praktis dilapangan sehingga dapat berguna bagi penulis bila kelak penulis terjun ke masyarakat atau bekerja.

#### **2. Bagi Instansi terkait**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi oleh semua pihak yang terkait dengan isu tentang Analisis Sektor bangunan Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kota Cirebon.

#### **3. Bagi penelitian selanjutnya**

Untuk menambah khasanah perpustakaan dan studi perbandingan bagi mahasiswa atau anaisis mendatang dalam peneilitian yang sama.